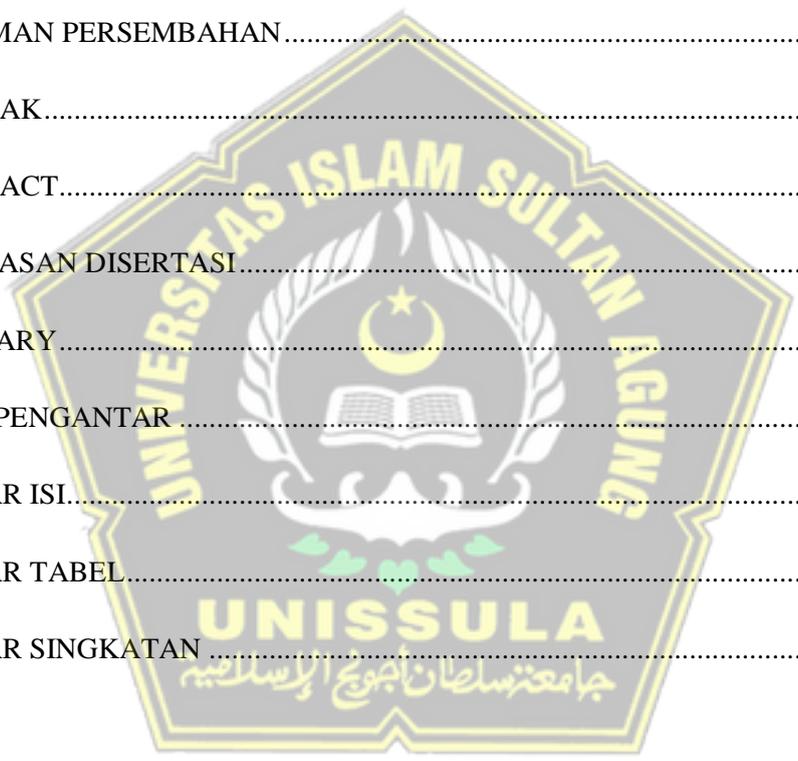


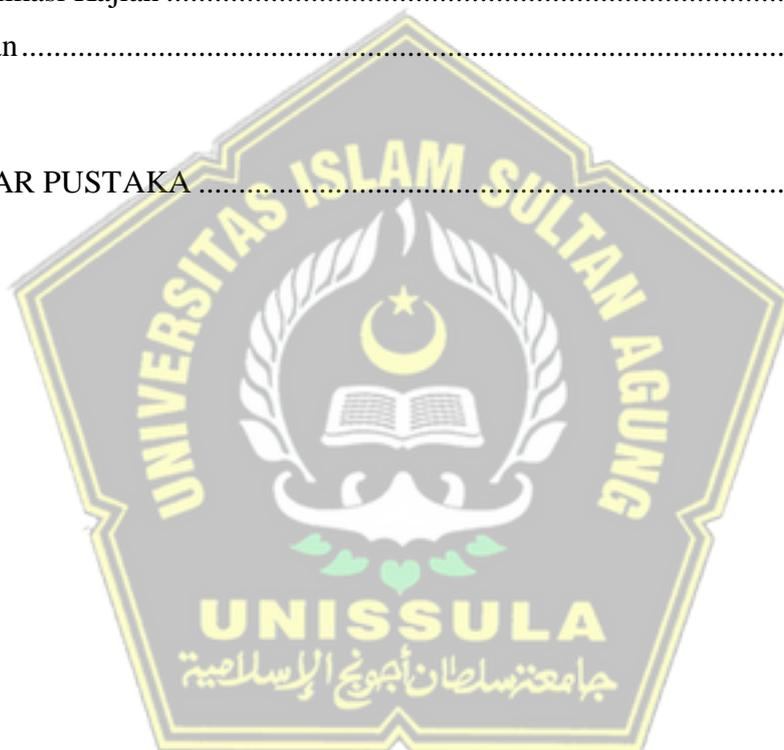
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALLAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
RINGKASAN DISERTASI.....	viii
SUMMARY.....	xxix
KATA PENGANTAR	xlviii
DAFTAR ISI.....	I
DAFTAR TABEL.....	Iiv
DAFTAR SINGKATAN	Iv
	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	38
C. Tujuan Penelitian.....	38
D. Kegunaan Penelitian.....	39
E. Kerangka Konseptual	40
F. Kerangka Teori	51
1. Grand Theory	51
1.1 Teori Keadilan Bermartabat.....	51

1.2 Teori Keadilan Hans Kelsen	61
2. Middle Theory.....	64
2.1 Teori Sistem Hukum Friedman.....	64
2.2 Teori Bekerjanya Hukum.....	67
2.3 Teori Hierarki Norma Hukum.....	71
3. Applied theory.....	75
3.1 Teori Legislasi.....	75
3.2 Legal Drafting	77
3.3 Peraturan Menteri.....	78
G. Kerangka Pemikiran.....	84
H. Metode Penelitian.....	85
1. Paradigma Penelitian.....	85
2. Jenis Penelitian.....	88
3. Metode Penelitian	92
4. Sumber Data Penelitian.....	97
5. Teknik Pengumpulan Data.....	101
6. Metode Analisis Data.....	102
I. Orisinalitas Penelitian.....	103
J. Sitematika Penulisan	105
BAB II KAJIAN PUSTAKA	107
A. Universal Health Coverage/ Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan.....	107
B. Akses dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Adil dan Bermutu.....	120
C. Sistem Kesehatan Nasional	130
D. Sistem Jaminan Nasional Kesehatan.....	135
E. Tanggung Jawab Negara/ Pemerintah Akan Kesehatan.....	147

BAB III POLITIK HUKUM PENGATURAN KLASIFIKASI RUMAH SAKIT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 30 TAHUN 2019.....		181
A. Pelayanan Kesehatan Menurut Peraturan Perundang-undangan.....		181
B. Undang-undang Tentang Rumah Sakit.....		189
C. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit		199
D. Respon Masyarakat Terhadap Diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.....		211
E. Kelemahan Penerapan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit , Khususnya pada Pasal 19 dan Lampirannya di Semarang		227
 BAB IV POLITIK HUKUM PENGATURAN KLASIFIKASI RUMAH SAKIT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG		
KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT		241
A. Keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.....		241
B. Respon Masyarakat Terhadap Keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.....		252
 BAB V POLITIK HUKUM PENGATURAN KLASIFIKASI RUMAH SAKIT PASCA PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT BERBASIS KEADILAN BERMARTABAT		262
A. Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik		262

B. Politik Hukum Pengaturan Klasifikasi Rumah Sakit Pasca Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Berbasis Keadilan Bermartabat	275
BAB VI PENUTUP	307
A. Kesimpulan	307
B. Implikasi Kajian	318
C. Saran	320
DAFTAR PUSTAKA	322



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kriteria klasifikasi rumah sakit.....	23
Tabel 2. Kriteria Sumber Daya Manusia Rumah Sakit.....	25
Tabel 3. Kerangka Pemikiran Disertasi.....	84
Tabel 4. Originalitas Penelitian.....	104
Tabel 5 . Kriteria klasifikasi rumah sakit 2.....	206
Tabel 6. Kriteria Sumber Daya Manusia Rumah Sakit 2.....	208

